

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Timur Tengah memang selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Pergolakan yang terus terjadi semakin menjadi perhatian dan keprihatinan bangsa Indonesia. Salah satu factor penyebab tingginya perhatian pada kawasan Timur Tengah karena adanya kedekatan emosional berupa keagamaan antar bangsa Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah.¹

Politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah terjalin begitu lama, semenjak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah melakukan berbagai bentuk kerja sama. Untuk melakukan kerja sama dengan Negara-negara Arab secara makro telah terjalin lama dimana masuknya Islam ke Indonesia, kemudian banyaknya umat muslim ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu bentuk peribadatan umat Islam, dan bahkan banyak pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di sana dan masih banyak lagi.

Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi berjalan sangat mesra mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka setiap tahun akan banyak jemaah haji yang akan berkunjung ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, tercatat pada tahun 2006 Indonesia memberangkatkan sekitar 205.000 jama'ah haji, jika biaya haji sekitar 2577,00 dolar AS, maka dana yang terkumpul adalah sekitar 528.285.000.00 dolar AS, atau

¹ M. Riza Sihbudi, dkk (1993), Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, PT. Eresco. Hal. 146

sekitar 4.860.222.000.000,00, dari jumlah tersebut menjadi devisa Arab Saudi.²Dapat dipastikan juga bahwa setiap tahun terjadi peningkatan. Tentu dengan demikian maka Negara Indonesia akan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Arab Saudi.

Peluang yang terjalin lama tentunya adalah jemaah haji setiap tahun, akan tetapi guna memperluas kerja sama kedua Negara maka peluang yang tersedia juga ada di sector pariwisata atau kunjungan wisata Arab Saudi ke Indonesia juga tercatat telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sampai dengan Oktober 2014, jumlah wisatawan asal Arab Saudi yang berjunjung ke Indonesia sebanyak 131 ribu orang, sementara total wisatawan asal Arab Saudi yang berwisata ke luar negeri mencapai sekitar 1,5 juta. Hampir 2/3 dari jumlah tersebut berkunjung ke Malaysia dan Dubai.³

Berbeda dengan Arab Saudi, hubungan bilateral Indonesia dan Iran dimulai semenjak 1950, namun kunjungan kerja oleh kepala Negara masing-masing tercatat di era presiden Soeharto pada tahun 1993, presiden Abdulrahman Wahid pada tahun 2000, Megawati pada tahun 2004 dan SBY pada tahun 2008. Sedangkan kunjung kepala Negara oleh Iran dilakukan di era Ali Akbar Hasemi Rafsanjani 1994 dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2006 dan 2012. Kunjungan kepala Negara tersebut telah menyetujui berbagai kerja sama di berbagai bidang. Pertahanan; Hukum dan Kekonsuleran; Counter Terrorism, Narcotics and Drugs, People Smuggling; antar Parlemen.⁴

Pada awal tahun 2016, dunia dikejutkan dengan konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran.Kejadian berawal pada tanggal 2 Januari 2016, pemerintah Riyadh mengumumkan telah mengeksekusi 47 orang dan salah satunya Ulama Besar Syi'ah Nimr al Nimr. Selang beberapa

² Dr. Sidik Jatmika, (2014), Pengantar Studi Kawasan TImur Tengah, Yogyakarta: Maharsah, Hal. 159

³ Soenarko, 2015, Tabloid Diplomasi, RI – Arab Saudi Akan Mendorong Kerjasama Ekonomi Yang Lebih Luas

⁴<http://kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=32> diakses pada 21 Januari 2016

jam dari pengumuman tersebut, rakyat Iran melakukan protes didepan kedutaan besar Arab Saudi untuk Iran di Teheran, meskipun saat demonstrasi berlangsung duta besar Arab Saudi untuk Iran sedang tidak berada ditempat, akan tetapi massa melakukan pembakaran di gedung kedutaan Arab Saudi tersebut. Akibat dari insiden tersebut, pada tanggal 3 Januari 2016 pemerintah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatic dengan Iran dan memberikan waktu 48 jam kepada duta besar Iran untuk meninggalkan Riyadh, Arab Saudi.

Nimr al Nimr (54 tahun) adalah seorang Ulama Syiah yang aktif dalam membela hak-hak minoritas Syiah serta menentang keras aksi represif dan diskriminasi pemerintah Arab Saudi terhadap kaum minoritas Syiah di Arab Saudi dan selama pergolakan Arab Spring 2011, Nimr mendukung kemerdekaan Katif dan Al-Ihsaa, dua wilayah di Arab Saudi yang mayoritas penduduknya adalah kaum Syiah. Nimr dicap “radikal” oleh pemerintah Arab Saudi dan ia kerap kali ditangkap dan dipenjarakan. Akan tetapi, meskipun ia dicap “radikal” oleh pemerintah Arab Saudi, ia tetap menyerukan perlawanan terhadap kekerasan terhadap pengikutnya (kaum Syiah). Pada tahun 2014, Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati terhadap Ulama Syiah tersebut dengan dakwaan membangkang pemerintah Negara dan dituduh merencanakan pembunuhan terhadap aparat keamanan.⁵

Memanasnya hubungan kedua Negara ini tidak hanya mengakibatkan pemutusan hubungan diplomasi Arab Saudi dan Iran, tetapi juga Negara-negara teluk sekutu Arab Saudi juga ikut berbondong-bondong memutuskan hubungan diplomasi dengan Iran, diantaranya Bahrein, Sudan, Yordania, Kuwait, Qatar, Djibouti, dan Somalia. Sedangkan Uni Emirat Arab memilih untuk menurunkan status hubungannya dengan Iran. Negara-negara memilih untuk

⁵<http://www.dw.com/id/siapa-nimr-al-nimr-yang-menyalut-konflik-iran-dan-arab-saudi/a-18958741> diakses pada 15 Januari 2016

memutuskan hubungan diplomatic karena menganggap bahwa Iran telah melanggar kesepakatan Internasional dengan tidak menjaga keamanan diplomat.

Banyak Negara yang ambil bagian dalam memutuskan hubungan bilateral dengan Iran membuat Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk Islam terbesar juga diajak dalam salah satu aliansi untuk memutuskan hubungan diplomatic, tetapi Jokowi dengan tegas menolak ajakan aliansi yang datang dari Arab Saudi untuk mendukung Arab Saudi dalam konfliknya dengan Iran. Jalan yang ditempuh Indonesia dalam konflik tersebut adalah posisi netral.⁶

Keseriusan Indonesia untuk menengahi konflik Arab Saudi dan Iran ini ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Arab Saudi dan Iran. Pada tanggal 13 Januari 2016, Menlu Retno telah bertemu dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif dan Presiden Hassan Rouhani untuk menyerahkan surat dari Presiden RI Joko Widodo yang berisi tentang pandangan dan keprihatinan Indonesia soal hubungan Iran dan Arab Saudi. Didalam surat tersebut Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu membenahi kedua Negara. Pada 18 Januari 2016, Menteri Retno juga menyampaikan pesan perdamaian dari Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Yammah, Riyadh. Dalam surat tersebut menekankan pada pentingnya stabilitas dan perdamaian kawasan, dan pentingnya hubungan baik antara Arab Saudi dan Iran, serta kesediaan Indonesia untuk membantu memperbaiki situasi hubungan Arab Saudi dan Iran.⁷

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam pembahasan skripsi dengan judul **“Kebijakan Indonesia menjadi mediator dalam menengahi konflik Arab Saudi – Iran dalam kasus eksekusi Nimr Al- Nimr”**

⁶http://m.solopos.com/2016/01/05/konflik-timur-tengah-diajak-masuk-aliansi-iran-vs-arab-ini-jawaban-jokowi-677701?mobile_switch=mobile diakses pada 21 Januari 2016

⁷<http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/pesan-damai-indonesia-arab-saudi.aspx> diakses pada 20 Januari 2016

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab sebagai berikut “Mengapa Indonesia menawarkan diri menjadi mediator dalam menengahi konflik Arab Saudi – Iran dalam kasus eksekusi Nimr Al-Nimr?”

C. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam studi kasus konflik Arab Saudi-Iran, penulis menggunakan konsep dan model (konsep kepentingan nasional dan Aktor Rasional) yang digunakan sebagai alat analisa. Berikut adalah penjelasan mengenai Konsep Kepentingan Nasional dan Model Aktor Rasional.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan salah satu konsep yang paling populer yang digunakan dalam analisa hubungan internasional. Analisa menggunakan konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menganalisa politik luar negeri suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau, Kepentingan Nasional adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.⁸ Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.

⁸ Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi, Jakarta, LP3ES, 1990, Hal. 140

Kepentingan nasional suatu negara-bangsa timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar batas-batas negaranya.⁹

2. Model aktor rasional

Dalam model aktor rasional, politik luar negeri dilihat sebagai tindakan dari aktor-aktor rasional. Unit analisa model pembuatan keputusan dalam rational actor adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternative-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan diperhitungkan untung-rugi atas masing-masing alternative tersebut.¹⁰

Dalam model aktor rasional, para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternative-alternatif menggunakan kriteria "*optimalisasi hasil*". Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.¹¹

Dalam upaya penyelesaian konflik antara Arab Saudi dan Iran, sikap Indonesia yang menawarkan diri untuk menjadi mediator menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam momentum ini adalah agar Indonesia diakui

⁹ Tulus Warsito, Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbataasannya, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal. 29.

¹⁰ Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.234

¹¹ Ibid, 234-235

sebagai negara middle power. Dengan diakuinya sebagai negara middle power, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Presiden Joko Widodo sebagai aktor pengambil keputusan. Presiden Joko Widodo sendiri mempertimbangkan untung rugi Indonesia menjadi negara middle power. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keuntungan Indonesia diakui sebagai negara middle power adalah menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dalam keterlibatan global

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, maka penulis menarik hipotesa yaitu motif Indonesia bersedia menjadi mediator dalam konflik Arab Saudi-Iran dalam kasus eksekusi Nimr Al-Nimr:

1. Indonesia ingin diakui sebagai negara *middle power*
2. Modalitas Indonesia sebagai mediator dalam konflik Arab Saudi-Iran

E. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung, seperti artikel ilmiah, situs internet, surat kabar, berita cetak maupun elektronik, statement pemerintah, wawancara, dan lain-lain.